

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada pola hubungan umum antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, bahwa pembangunan sumber daya manusia suatu negara merupakan faktor fundamental dan menentukan kekayaan dan kualitas hidup warganya. Memang, saat ini pendekatan pembangunan ekonomi menempatkan standar yang tinggi untuk mengembangkan tenaga kerja suatu negara, agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan negara tersebut. Salah satunya adalah tercapainya kondisi *full employment*, kondisi ekonomi dimana tenaga kerja yang tersedia terserap sepenuhnya dan rendahnya kemiskinan. (Alex Ehimare et al., 2014). Mengutip dari buku Adam Smith yang berjudul “*wealth of nation*”, karya Adam Smith berkata bahwa sumber daya manusia adalah salah satu hal yang penting dan berguna bagi suatu negara (Oluwatobi, 2011). Dalam makalahnya (Ilegbinosa, 2013) menjelaskan bahwa, sumber daya manusia adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk pasar tenaga kerja, pendidikan adalah salah satu hal yang utama dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah hal yang penting dalam pengembangan modal sumber daya manusia di negara lainnya. Para ekonom pembangunan menilai bahwa modal manusia terdiri atas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan lainnya yang mampu meningkatkan produktivitas. Kesehatan dan pendidikan mampu meningkatkan produktivitas individu anggota masyarakat (Lawanson, 2011). Menurut (Schultz, 1961) yang dikutip oleh (Ijaiya G. and

Ijaiya M., 2005) dikatakan bahwa ada lima cara yang dapat membangun modal manusia, diantaranya adalah:

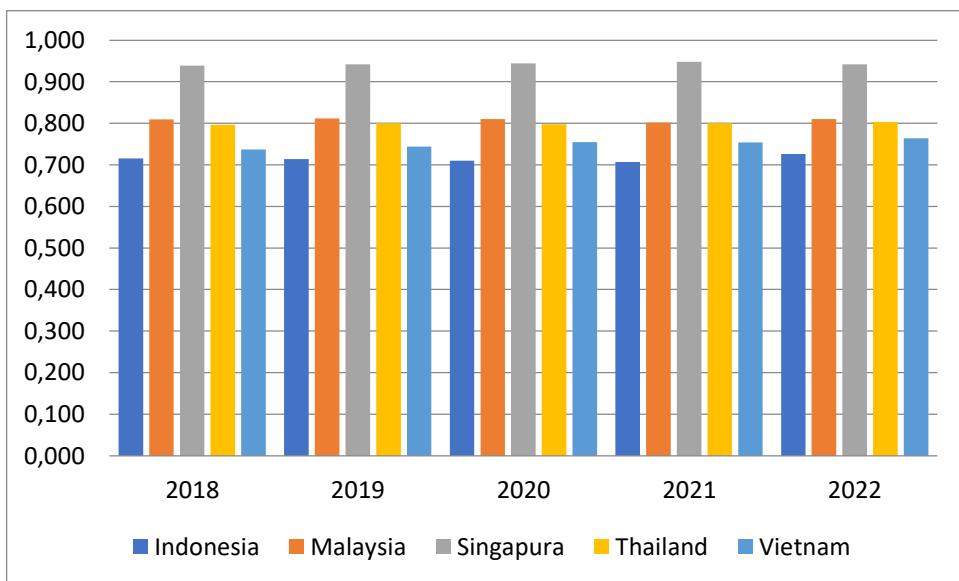
1. Pelayanan kesehatan dan fasilitas;
2. Pelatihan kerja;
3. Pendidikan yang dilaksanakan secara formal seperti sekolah dasar, menengah, sampai ke jenjang lebih tinggi;
4. Program studi untuk orang dewasa;
5. Menjadi migrasi individu dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja.

Dalam arti sempit, investasi dalam pendidikan merupakan bentuk pengeluaran dalam mengupayakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi dalam pandangan luas peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi dalam pandangan luas peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi pengeluaran kesehatan dan pelayanan sosial lainnya (Jhingan, 2005).

United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai salah satu tolak ukur standar pembangunan manusia suatu negara. Kemudian dipublikasikan melalui HDR atau Human Development *Report* sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibentuk menggunakan tiga dimensi dasar. Ketiga dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. Pada tahun 2010 UNDP mengubah metodologi pengukuran komponen IPM, metodologi yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup

(AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, dan metodologi agregasi menggunakan rata-rata geometrik.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Statistik Nasional (BPS) terus menyempurnakan IPM, tercatat ada dua kali penyempurnaan dari pertama diperkenalkan ke publik oleh UNDP pada tahun 1990. Penyempurnaan IPM yaitu yang pertama pada tahun 1991 IPM yang disempurnakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PDB per kapita, kedua pada tahun 1995 penyempurnaan IPM dengan memasukkan kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) ke metodologi yang sebelumnya.



Gambar 1.1 Nilai IPM Lima Negara ASEAN 2018-2022

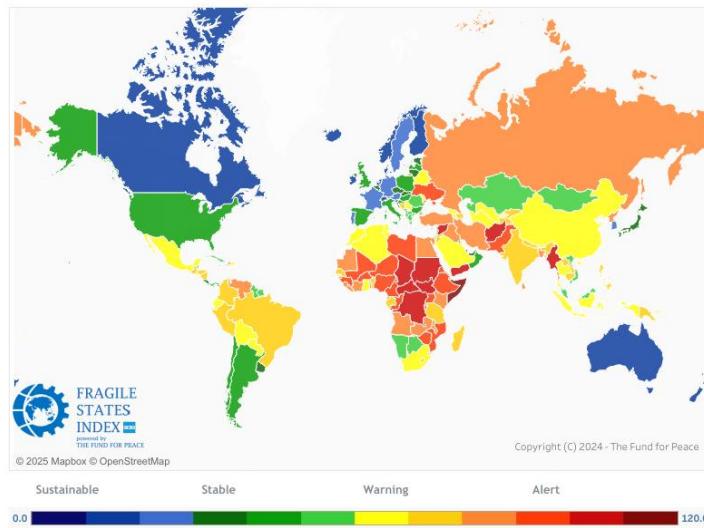
Sumber: ourworldindata

Dapat dilihat grafik *Human Development Index* (HDI) menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia lima negara Asia Tenggara

Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Singapura secara konsisten memiliki HDI tertinggi, stabil di atas 0,93, menandakan tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan yang sangat tinggi. Malaysia dan Thailand berada pada tingkat menengah dengan HDI mendekati 0,82 dan 0,8, menunjukkan stabilitas namun belum mencapai level Singapura. Sementara itu, Vietnam mencatat peningkatan signifikan dari sekitar 0,74 menjadi hampir 0,78, mencerminkan kemajuan pembangunan yang positif. Indonesia memiliki HDI terendah di antara kelima negara, meski menunjukkan tren peningkatan dari sekitar 0,71 ke 0,73. Secara keseluruhan, grafik ini menyoroti kesenjangan pembangunan manusia di kawasan, di mana negara seperti Vietnam dan Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, khususnya melalui peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan berarti suatu negara telah memiliki fundamental, pembangunan sumber daya manusia yang tangguh serta dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun yang datang dari dalam negara itu sendiri. Salah satu ancaman tersebut dapat berupa perdagangan bebas, dimana Indonesia akan melakukan kerja sama perdagangan dengan negara Asia lainnya yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) pada tahun 2015. Untuk itu, perlu sistem dan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik. Peningkatan tersebut bertujuan membuat sumber daya manusia dapat memperkuat fundamental pembangunan sumber daya manusia. Dilihat dari sisi

demografi Sumber Daya Manusia Indonesia merupakan salah satu negara yang produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70%nya merupakan usia produktif. Jika dilihat pada sisi ketenagakerjaan, Indonesia memiliki 118 juta angkatan kerja (Ritonga, 2014). Pada tahun 2020 mendatang Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi yang di maksud yaitu, negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter *Dependency Ratio* (angka beban ketergantungan) yang cukup rendah yaitu mencapai 44. Data badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan *dependency ratio* Indonesia pada tahun 2010 sebesar 50,5 sementara pada tahun 2015 adalah sebesar 48,6. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2020-2030 *dependency ratio* Indonesia akan semakin kecil, yang akan menciptakan bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk pada kelompok usia yang produktif dibandingkan kelompok usia yang non-produktif dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional terutama pada sektor ekonomi. Akan tetapi untuk memanfaatkan kondisi, kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal antara lain melalui peningkatan tingkat pendidikan untuk kelompok usia yang produktif baik untuk penduduk desa maupun kota. Menurut (UNESCO, 2012) untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi seseorang harus membutuhkan keterampilan yang memadai.



Gambar 1.2 Peta Status Indeks Pembangunan Manusia Dunia

Sumber: www.fundforpeace.org

Gambar 1.2 menjelaskan status IPM pada tahun 2025, gambar tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN masih memiliki Level IPM yang *warning*, dengan demikian IPM negara Indonesia dan Thailand kategori *warning*, negara Malaysia kategori *stable*, negara Singapura kategori *sustainable*. Sedangkan negara-negara maju seperti benua Eropa dan Amerika memiliki level IPM yang stabil dan berkelanjutan (warna hijau dan biru). Dalam hal ini maka pemerintah harus lebih berperan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, dengan cara berinvestasi disektor kesehatan dan pendidikan terutama masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai maka masyarakat kurang mampu dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja, sehingga mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka sejalan dengan lebih baik kinerjanya mereka dan akan mengurangi kesenjangan dalam perekonomian disuatu negara. Selain itu, untuk meningkatkan pembangunan suatu negara dibutuhkan pula masyarakat yang

unggul dalam pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, kesejahteraan ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

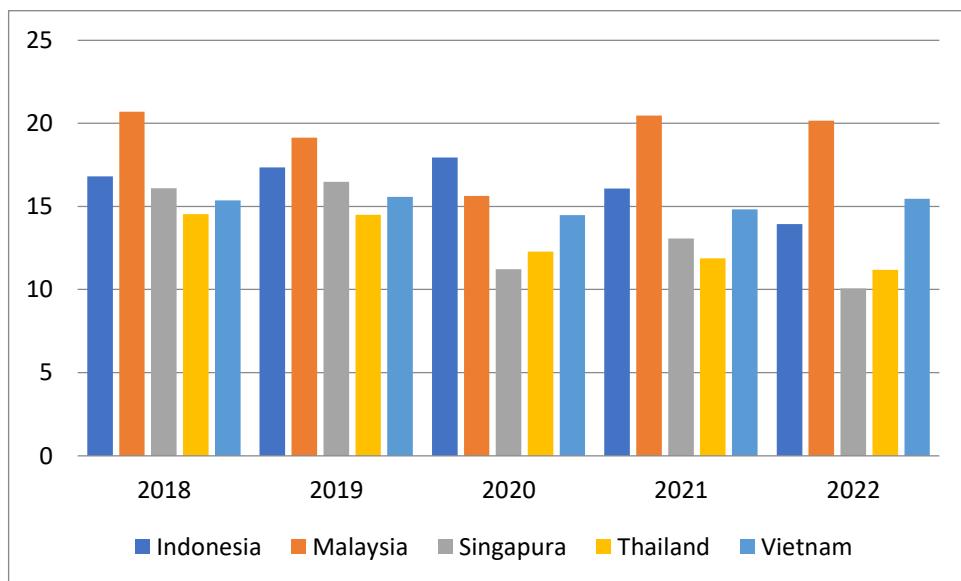
Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output*, maupun kesempatan kerja dan memicu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori tentang pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin besar. Meskipun demikian, peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang lebih banyak. Selain

itu pada tahap menengah, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor ekonomi yang makin kompleks, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk melindungi penduduk dari *eksternalitas* negatif suatu sektor dan melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap PDB akan semakin besar dan sebaliknya persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

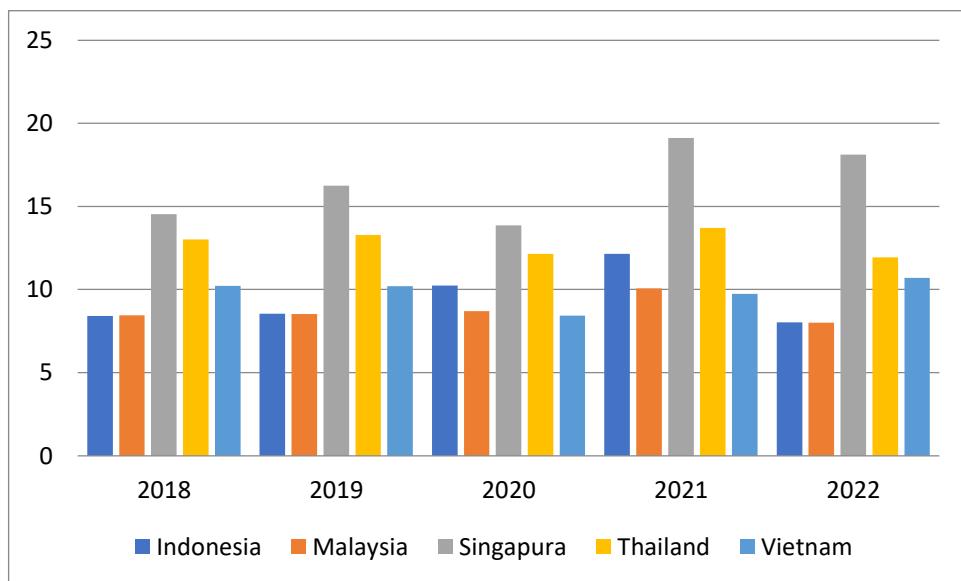


Gambar 1.3 Perkembangan Proporsi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan di Lima Negara ASEAN (Persen)

Sumber: World Bank (diolah)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan proporsi belanja pemerintah di sektor pendidikan dari lima negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan

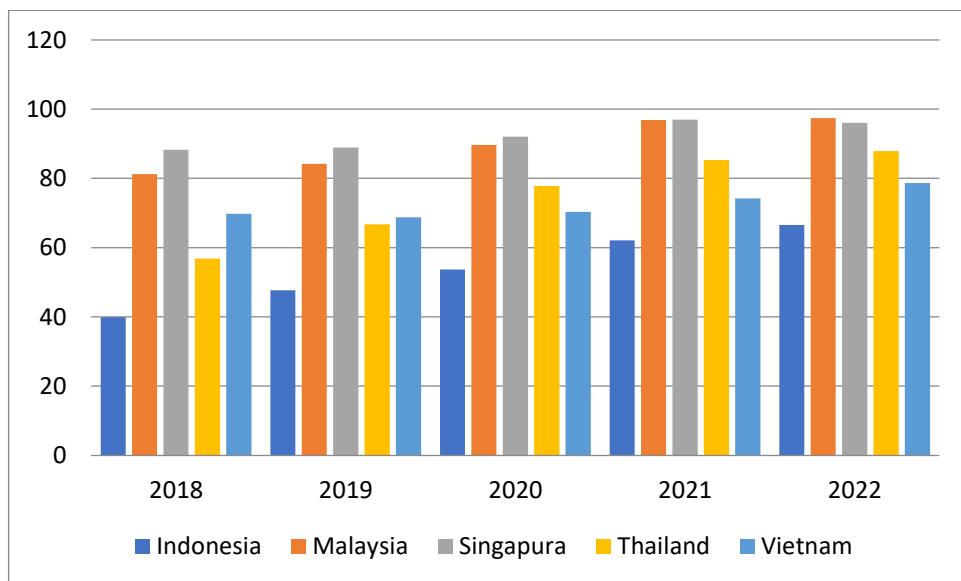
Vietnam selama periode 2018 hingga 2022. Malaysia konsisten menjadi negara dengan proporsi belanja pendidikan tertinggi, khususnya pada tahun 2018, 2021, dan 2022, yang mencerminkan komitmen tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia. Indonesia dan Vietnam menunjukkan kecenderungan yang cukup stabil dengan fluktuasi kecil, sementara Thailand mengalami penurunan bertahap dalam lima tahun terakhir. Singapura mencatat penurunan paling drastis, dari posisi menengah pada 2018–2019 menjadi yang terendah di 2022. Pola ini mengindikasikan adanya perbedaan prioritas kebijakan pendidikan antar negara dan dinamika alokasi anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, perubahan pemerintahan, atau kebijakan fiskal masing-masing negara.



Gambar 1.4 Perkembangan Proporsi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan di Lima Negara ASEAN (Persen)

Sumber: World Bank (diolah)

Gambar di atas menggambarkan perkembangan proporsi belanja pemerintah di sektor kesehatan dari lima negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode 2018 hingga 2022. Singapura secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan terbesar dibanding negara lain, dengan lonjakan signifikan pada 2021 mencapai lebih dari 20%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penanganan pandemi COVID-19. Thailand juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap sektor kesehatan, dengan angka yang stabil di atas 12% sepanjang periode. Sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam berada di kisaran menengah ke bawah, dengan proporsi belanja yang relatif stabil namun lebih rendah dibanding Singapura dan Thailand. Menariknya, Malaysia mencatatkan penurunan tajam pada 2022, sementara Vietnam menunjukkan fluktuasi moderat.

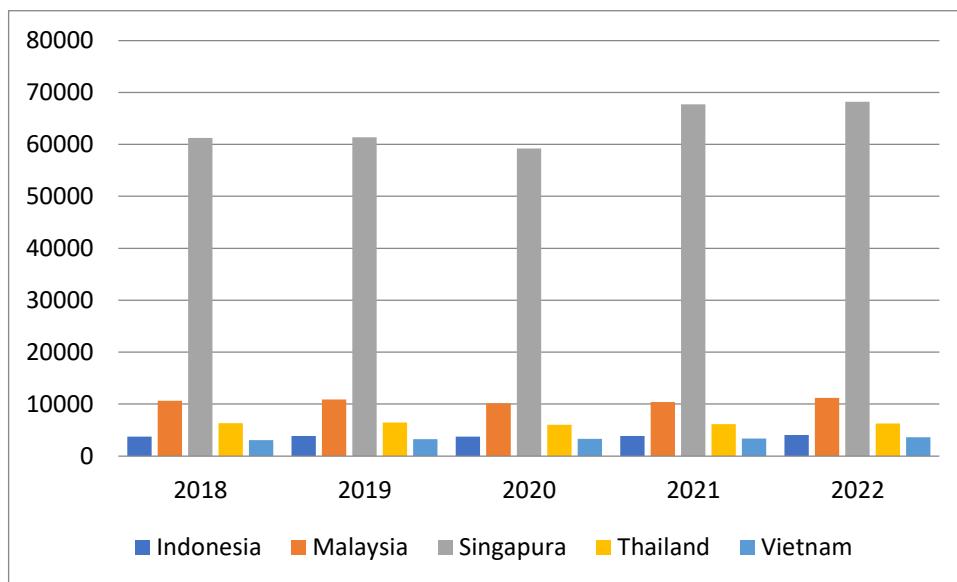


Gambar 1.5 Persentase Masyarakat yang Sudah Menggunakan Internet di Lima Negara ASEAN (Persen)

Sumber: World Bank (diolah)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan persentase jumlah masyarakat yang sudah menggunakan internet di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, selama periode tahun 2018 hingga 2022. Secara umum, terlihat tren peningkatan penggunaan internet di seluruh negara yang diamati, meskipun kecepatan peningkatan bervariasi antarnegara. Singapura konsisten menjadi negara dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di antara lima negara tersebut, dengan persentase pengguna internet selalu berada di atas 85% dan mencapai hampir 100% pada tahun 2021 dan 2022. Malaysia mengikuti dengan pertumbuhan yang stabil, dimulai dari sekitar 82% pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga menyamai angka Singapura pada tahun 2021 dan 2022, menunjukkan bahwa akses internet di Malaysia semakin merata. Thailand juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari 58% pada tahun 2018 menjadi 88% pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya upaya kuat dari pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan infrastruktur digital dan inklusi teknologi. Di sisi lain, Vietnam memperlihatkan perkembangan yang cukup stabil namun tidak secepat negara-negara lain, dari sekitar 70% pada tahun 2018 menjadi hampir 80% pada 2022, yang menunjukkan adanya peningkatan namun masih menyisakan ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Sementara itu, Indonesia memulai dari posisi terendah di antara lima negara, yaitu hanya sekitar 40% pada tahun 2018, namun mencatatkan peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, mencapai sekitar 68% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menghadapi tantangan dalam hal geografis dan

infrastruktur, upaya perluasan akses internet, khususnya melalui program digitalisasi dan pengembangan jaringan di daerah terpencil, mulai menunjukkan hasil yang positif.



Gambar 1.6 Jumlah Pendapatan Per kapita Lima Negara ASEAN (USD)

Sumber: World Bank (diolah)

Pada gambar menunjukkan jumlah pendapatan per kapita (dalam USD) dari lima negara ASEAN Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode 2018 hingga 2022. Singapura secara mencolok memiliki pendapatan per kapita tertinggi, jauh melampaui negara lainnya, dengan nilai konsisten di atas 59.000 USD dan mengalami kenaikan signifikan setelah 2020 hingga mencapai lebih dari 70.000 USD pada 2022. Malaysia berada di posisi kedua, dengan pendapatan per kapita berkisar antara 10.000 hingga 12.000 USD, dan menunjukkan tren yang relatif stabil. Thailand menyusul di kisaran 7.000 USD, juga dengan fluktuasi yang kecil. Sementara itu, Indonesia dan Vietnam mencatat pendapatan per kapita terendah di antara kelima negara, masing-masing

berada di bawah 5.000 USD, meskipun keduanya menunjukkan pertumbuhan yang perlahan namun stabil. Grafik ini menggambarkan kesenjangan ekonomi yang cukup besar antar negara ASEAN, khususnya antara negara maju seperti Singapura dan negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas kita ketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar masyarakat disuatu negara dapat memaksimalkan kualitas yang dimilikinya dan mampu menghasilkan output untuk negaranya. Dari penjelasan diatas timbul beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kondisi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di lima negara ASEAN pada tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan perkapita secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di lima negara ASEAN pada tahun 2010-2022?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan perkapita secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di lima negara ASEAN pada tahun 2010-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet, dan pendapatan perkapita secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di lima negara ASEAN pada tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, penggunaan internet dan pendapatan perkapita secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di lima negara ASEAN pada tahun 2010-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dengan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini mampu memberikan gambaran bagi pemerintah sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan dampak pengeluaran pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi teori terkait pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat serta memperkaya wawasan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks pengembangan sumber

daya manusia. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel tingkat penggunaan internet sebagai faktor penunjang kesejahteraan masyarakat di era digital, serta pendekatan dimensi ruang yang mencakup wilayah-wilayah di kawasan ASEAN, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan terhadap perbedaan geografis dan tingkat pembangunan antar negara di kawasan tersebut. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di lima negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Menggunakan data-data yang bersifat sekunder yang berarti data tersebut diambil dari publikasi pemerintah, situs-situs terpercaya, jurnal atau penelitian terdahulu dan lain-lain.

1.4.4 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari sampai Oktober tahun 2025 dimulai dengan pengajuan judul ke Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dengan jadwal matriks sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Matriks Jadwal Penelitian

